

URGENSI UNDANG-UNDANG DAERAH KEPULAUAN DALAM MENGATASI KETIMPANGAN FISKAL DI DAERAH KEPULAUAN (STUDI DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU)

Oleh
Muhammad Idlal Farhan
NIM. 2105040090

ABSTRAK

Provinsi Kepulauan Riau menghadapi tantangan struktural berupa ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) dan disparitas fiskal akibat kebijakan desentralisasi yang masih bersifat simetris. Ketimpangan ini terjadi karena instrumen hukum positif saat ini, khususnya regulasi Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, masih bias daratan (*land-based bias*) dalam memformulasikan Dana Transfer ke Daerah (TKD). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis urgensi Undang-Undang Daerah Kepulauan ditinjau dari aspek filosofis, sosiologis, yuridis, dan politis. Metode yang digunakan adalah normatif-empiris, menggabungkan analisis norma dalam draf RUU Daerah Kepulauan dengan data faktual lapangan melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan urgensi yang mendesak. Secara filosofis, Undang-Undang Daerah Kepulauan merupakan manifestasi reorientasi keadilan distributif yang mengakui karakteristik kewilayahan serta wujud kepatuhan terhadap amanat konstitusi negara kepulauan. Secara sosiologis, struktur APBD Kepulauan Riau mengalami tekanan defisit di mana Belanja Daerah melampaui Pendapatan Daerah, kondisi ini diperparah oleh realisasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebagai penyumbang pendapatan utama yang justru mengalami penurunan dari tahun 2022 ke 2024, selain itu rendahnya jumlah total realisasi Dana TKD juga berdampak terhadap ketimpangan pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat di daerah kepulauan. Secara yuridis, kegagalan konstruksi hukum positif menuntut rekonstruksi melalui penerapan Pasal 29 RUU Daerah Kepulauan mengenai reformulasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mengakui Indeks Kemahalan Konstruksi, serta Pasal 30 RUU tersebut mengenai alokasi Dana Khusus Kepulauan (DKK) minimal 5 persen. Secara politis, hambatan utama terletak pada hegemoni paradigma kontinental dan ketakutan fiskal pemerintah pusat terhadap beban APBN, yang menempatkan daerah kepulauan pada posisi tawar yang lemah. Kesimpulannya, urgensi Undang-Undang Daerah Kepulauan bukan sekadar tuntutan politis, melainkan kebutuhan mendesak untuk mewujudkan keadilan distributif; tanpa intervensi regulasi khusus yang bersifat *affirmative action*, ketimpangan fiskal di Provinsi Kepulauan Riau akan terus melebar, sehingga reformasi kebijakan desentralisasi asimetris menjadi satu-satunya jalan keluar konstitusional bagi kesejahteraan masyarakat kepulauan.

Kata Kunci: RUU Daerah Kepulauan, Ketimpangan Fiskal, Kepulauan Riau.

**THE URGENCY OF THE ARCHIPELAGIC REGION BILL IN
ADDRESSING FISCAL INEQUALITY IN ARCHIPELAGIC REGIONS
(STUDY IN RIAU ISLANDS PROVINCE)**

By
Muhammad Idlal Farhan
NIM. 2105040090

ABSTRACT

Riau Islands Province faces structural challenges in the form of a high-cost economy and fiscal disparity due to decentralization policies that remain symmetric. This inequality occurs because current positive legal instruments, particularly the Central and Regional Financial Relations regulation, still exhibit a land-based bias in formulating the Transfer to Regions Fund (TKD). The purpose of this research is to analyze the urgency of establishing the Archipelagic Region Law viewed from sociological, juridical, and political aspects. The method used is normative-empirical, combining the analysis of norms in the draft of the Archipelagic Region Bill with factual field data through document studies and interviews. The results indicate a pressing urgency. Philosophically, the formation of this law is a manifestation of the reorientation of distributive justice that recognizes regional characteristics and serves as compliance with the constitutional mandate of an archipelagic state. Sociologically, the Riau Islands APBD structure is under deficit pressure where Regional Expenditure exceeds Regional Revenue; this condition is exacerbated by the realization of the Transfer to Regions Fund (TKD) as the main revenue contributor, which actually decreased from 2022 to 2024. Furthermore, the low total realization of TKD funds also impacts the inequality of basic services and community welfare in archipelagic regions. Juridically, the failure of positive legal construction demands reconstruction through the implementation of Article 29 of the Archipelagic Region Bill regarding the reformulation of the Special Allocation Fund (DAK) which acknowledges the Construction Cost Index, and Article 30 of the Bill regarding the allocation of the Archipelagic Special Fund (DKK) of at least 5 percent. Politically, the main obstacle lies in the hegemony of the continental paradigm and the central government's fiscal fear regarding the burden on the State Budget (APBN), which places archipelagic regions in a weak bargaining position. In conclusion, the urgency of the Archipelagic Regions Law is not merely a political demand, but a pressing necessity to achieve distributive justice; without specific regulatory intervention in the form of affirmative action, fiscal inequality in Riau Islands Province will continue to widen, making asymmetric decentralization policy reform the only constitutional solution for the welfare of archipelagic communities.

Keyword: Archipelagic Regions Bill, Fiscal Inequality, Riau Islands.